

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
2023**



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOYOLALI**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pembangunan Nasional dilaksanakan secara sistematis, terarah dan bersinambungan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahapan persiapan penyusunan, tahapan penyusunan rancangan, dan tahap penetapan. Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi pendukung, tahapan penyusunan rancangan RKPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen RKPD definitif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun RKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk kesinambungan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Boyolali dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) di bidang perdagangan dan perindustrian sebagai satu kesatuan RKPD Kabupaten Boyolali.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023 memuat program, kegiatan dan sub

kegiatan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali periode 2021-2026 dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali. Selain itu Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga mengakomodir usulan tambahan penataan lingkungan pasar Ampel, penataan ex pasar Kebonagung, masterplan kawasan kaki lima, pembangunan saluran pipa PUDAM di showroom Indrokilo, penyusunan perda tentang RPIK, talud pasar Cepogo selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS-P) dan menjadi rangkaian dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- p. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun

- 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 287);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007;
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - x. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 109);
 - y. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 54).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dimaksudkan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan menjadi pedoman guna memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan mendukung Visi dan Misi Bupati Boyolali sesuai RPJMD Kabupaten Boyolali, memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Boyolali untuk tahun 2023 melalui pelaksanaan program,

kegiatan dan sub kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian.

1.3.2. Tujuan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali, adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali tahun 2023 adalah:

- 1) Mendiskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali;
- 2) Menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan;
- 3) Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- 4) Menjadi dasar bagi penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali;
- 5) Meningkatkan sistem informasi perdagangan dan perindustrian dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat;
- 6) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan perdagangan dan perindustrian.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja SKPD perubahan ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang mana dari satu bab ke bab berikutnya merupakan suatu urutan

pemikiran dan pengkajian aspek-aspek yang diperlukan hingga perumusan kegiatan-kegiatan.

Secara singkat bab-bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Solusi dan Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja PD tahun 2023

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023
- 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI
TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali adalah penjabaran perencanaan tahunan sampai dengan triwulan II tahun berjalan dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali adalah perencanaan lima tahunan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali menyajikan dasar pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pengukuran kinerja tujuan dan sasaran dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023 s/d triwulan II dan target tahun 2023. Dalam mengevaluasi capaian dan analisis kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali mengacu kepada:

2.1.1. Rencana Kerja

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Boyolali, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali telah menetapkan tujuan dan sasaran pelayanan SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali beserta indikator dan target IKU tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Bupati Boyolali Nomor 100 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Adapun IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali diuraikan pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
CAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 S/D TW II

No	Program/Kegiatan	Indikator (output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi sesuai estandar	%	100	50,13	50,13
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	7.854.788 .000	3.976.14 2.475	50,62
3.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase koefisiensi variasi harga antar waktu	%	100	46,15	46,15
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor	%	100	85,62	85,62
5.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase alat UTP yang sudah tertib ukur	%	100	26,47	26,47
6.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk olahan Susu yang dipasarkan	%	100	50	50
7.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang terlatih	%	100	64,44	64,44

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali sesuai apa yang sudah dijadikan indikator dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

A. Indikator Kinerja: Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi sesuai standar

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan rutin yang menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari kedinasan.
2. Hasil: dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 100% sampai dengan akhir TW II terealisasi 50,13%.
3. Faktor Pendukung: kegiatan ini didukung dengan anggaran yang cukup dari APBD.
4. Faktor penghambat: secara umum tidak ada kendala yang berarti, meskipun demikian ada beberapa kegiatan yang harus menunggu perubahan anggaran dikarenakan ada sedikit perubahan agar peruntukannya bisa lebih dimaksimalkan.
5. Alternatif pemecahan masalah: segera melaksanakan perubahan pada anggaran perubahan.
6. Kesimpulan:
 - Target RPJMD pada tahun 2023 sebesar 100% sampai akhir TW II dapat tercapai 50,13%.

B. Indikator Kinerja: Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar

1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan pengelolaan pendapatan retribusi pasar milik Pemerintah Daerah berupa intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar umum maupun pasar hewan yang dikelola Pemkab Boyolali.
2. Hasil: dari target RPJMD tahun 2023 sebesar Rp. 7.854.788.000,00 sampai dengan akhir TW II tercapai Rp. 3.976.142.475,00 atau 50,62%.
3. Faktor pendukung: keberhasilan capaian indikator kinerja ini berupa adanya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap penarikan retribusi pasar serta adanya pembangunan pasar dan perbaikan sarana dan prasarana pasar baik pasar umum maupun pasar hewan.

4. Faktor penghambat: masih kurangnya tenaga penarik retribusi pasar dan cukup banyak kios pasar di lantai dua yang tidak laku karena lokasi kurang strategis.
5. Alternatif pemecahan masalah dengan mengusulkan penambahan tenaga penarik retribusi dan perintisan e-retribusi serta kemudahan dalam menyewakan kios.
6. Kesimpulan:
 - Target RPJMD pada tahun 2023 sebesar Rp. 7.854.788.000,00 sampai dengan akhir TW II tercapai Rp. 3.976.142.475,00 atau 50,62%.

C. Indikator Kerja: Prosentase alat UTTP yang sudah tertib ukur

1. Untuk melaksanakan indikator ini melalui program standardisasi dan perlindungan konsumen dengan kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
2. Hasil: dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 15.000 pelaku usaha dan konsumen, dan sampai dengan akhir TW II terealisasi 3.971 pelaku usaha, tercapai 26,47%.
3. Faktor Pendukung :
 - Telah terbentuknya UPT Metrologi Legal Kabupaten Boyolali;
 - Adanya pendataan UTTP yang dilaksanakan di 22 Kecamatan;
 - Perintisan pengadaan sarpras metrologi;
4. Faktor penghambat adalah:
 - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tera ulang UTTP.
 - Belum adanya gedung kantor UPT Metrologi Legal yang representatif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta penyimpanan peralatan-peralatan yang berharga.
5. Alternatif pemecahan masalah: Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya tera ulang UTTP.
6. Kesimpulan:

Target RPJMD pada tahun 2023 sebesar 15.000 pelaku usaha dan konsumen sampai dengan akhir semester II dapat terealisasi 3.971 pelaku usaha atau 26,47%.

D. Indikator Kerja: Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor

1. Untuk melaksanakan indikator ini melalui Program Pengembangan Ekspor dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Hasil: dari target RPJMD tahun 2023 akhir semester TW II terealisasi 85,62%.
3. Faktor pendukung: komunikasi yang baik antara dinas dengan pelaku usaha.
4. Faktor penghambat: Keikutsertaan dalam pameran masih tergantung pada undangan pameran baik tingkat Pusat maupun Provinsi.
5. Alternatif pemecahan masalah: Aktif mencari informasi terkait even pameran baik secara offline maupun online.
6. Kesimpulan:
 - Target RPJMD pada tahun 2023 dapat tercapai 85,62%.

E. Indikator Kerja: Prosentase koefisiensi variasi harga antar waktu

1. Capaian indikator ini melalui program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
2. Hasil dari target RPJMD tahun 2023 menunggu release dari BPS.
3. Faktor Pendukung berupa adanya kegiatan: Anggaran tercukupi dari APBD.
4. Faktor penghambat: Harga yang tidak stabil di pasaran.
5. Alternatif pemecahan masalah: distribusi barang yang lancar dan melakukan pemantauan harga dan stok barang di pasar.
6. Kesimpulan: Data BPS belum direlease

F. Indikator Kerja: Persentase IKM yang terlatih

1. Untuk melaksanakan indikator ini melalui program perencanaan dan pembangunan industri dengan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
2. Hasil dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 450 IKM/orang tercapai 290 IKM/orang atau terealisasi 64,44%.
3. Faktor Pendukung: adanya dukungan dari Pusat.

4. Faktor penghambat: Kurangnya kesadaran, kemauan/motivasi mengikuti sosialisasi dan pelatihan.
5. Alternatif pemecahan masalah: Mengoptimalkan penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan.
6. Kesimpulan:
 - Target RPJMD pada tahun 2023 sebesar 450 IKM/ orang, terealisasi 64,44%.

G. Indikator Kerja : Persentase Produk olahan Susu yang dipasarkan

1. Untuk melaksanakan indikator ini melalui program perencanaan dan pembangunan industri dengan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
2. Hasil dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 2 produk, sampai dengan TW II terealisasi 50%.
3. Faktor pendukung: adanya dukungan dari Pusat.
4. Faktor penghambat: Kurangnya pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan/motivasi serta upaya meningkatkan produksi hasil olahan susu.
5. Alternatif pemecahan masalah: Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/pelatihan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil olahan susu.
6. Kesimpulan: target RPJMD pada tahun 2023 sebesar 2 produk dapat terealisasi 50%.

Dari semua uraian di atas dapat kita lihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-	-	3,68 – 5,15	4,18 – 5,40	4,68 – 5,65	5,18 – 5,90	5,68 – 6,15	6,33	-	-	-	-
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	-	-	2	2,5	3	3,5	4	2,04	-	-	-	-
3	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	800	823	833	893	903	843	-	-	-	-

2.3 Solusi dan Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2023

Isu-Isu strategis diperoleh dengan mengakomodasi isu pelayanan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, permasalahan dan/ atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan isu utama Kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali yaitu:

1. Meningkatkan daya saing industri yang berwawasan lingkungan;
2. Peningkatan peran industri dan perdagangan dalam sektor perekonomian dan perlunya peningkatan penggunaan sumber daya/ bahan baku lokal;
3. Pembentukan lembaga yang memberikan perlindungan konsumen dalam rangka pengembangan tertib niaga dan perlindungan konsumen;
4. Peningkatan bina usaha perdagangan, kelancaran sistem distribusi barang, pemberdayaan konsumen, standarisasi dan tertib ukur ekspor;
5. Peningkatan ketersediaan sarana perdagangan yang representatif dan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatnya partisipasi pedagang ekonomi lemah;
6. Pengembangan variasi barang ekspor, peningkatan promosi perdagangan dan penyederhanaan prosedur ekspor untuk meningkatkan ekspor daerah.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan daya saing perdagangan dan perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai UPT Metrologi Legal;
2. Sebagian industri memiliki ketergantungan terhadap peralatan/ mesin, bahan baku dan penolong, serta barang setengah jadi dari luar daerah bahkan luar negeri;

3. Meningkatnya persaingan dalam pemasaran produk seiring makin kuatnya arus perdagangan bebas;
4. Masih rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah dan belum berwawasan lingkungan;
5. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan, profesionalisme, inovasi pelaku usaha, penguasaan teknologi produksi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk;
6. Masih terbatasnya sarpras perdagangan yang representatif;
7. Belum tertata secara tertib lokasi tempat usaha bagi pedagang ekonomi lemah/PKL.

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERUBAHAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,68 -5,15	4,18 -5,40	4,68 -5,65	5,18 -5,90	5,68 -6,15
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri	3,88	4,91	5,94	6,97	8,00
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	1	2	3	4	5
		Meningkatnya Stabilitas harga barang dan jasa	Indeks Harga Konsumen	109,89	112,89	115,39	117,89	120,39
2	Meningkatnya kesejahteraan petani		Nilai Tukar Petani (NTP)	2	2,5	3	3,5	4
		Meningkatnya agro industri susu	Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu	2	2,5	3	3,5	4
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	800	823	833	893	903
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	81,3	82,10	82,35	82,60	82,85

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Boyolali Maju Meneruskan Pro Investasi			
MISI 1: Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan			
MISI 3 : Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian	Peningkatan kapasitas pemasaran barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi metode pemasaran barang 2. Peningkatan fasilitasi Perijinan Pengembangan Usaha 3. Peningkatan promosi produk potensial ekspor 4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
	Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa	Peningkatan kelancaran distribusi barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan stok barang pokok 2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian	Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM 2. Peningkatan akses permodalan 3. Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna 4. Penerapan metode produksi berorientasi bisnis
Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatnya agro industri susu	Peningkatan Kapasitas Pemasaran Produk Olahan Susu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan promosi produk olahan susu 2. Fasilitasi pemasaran produk olahan susu
		Pengembangan Industri Sektor Susu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan susu 2. Peningkatan kompetensi SDM pelaku agro industri susu
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja	Peningkatan fasilitasi perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Tabel 3.2

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Boyolali

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boyolali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Boyolali	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	84.09	0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Boyolali	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	84.09	26.472.000.000	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan	Kab. Boyolali	Jumlah Sarana distribusi perdagangan yang kondisinya baik	37	0	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan	Kab. Boyolali	Jumlah Sarana distribusi perdagangan yang kondisinya baik	37	26.472.000.000	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Boyolali	Jumlah Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	1 Paket	0	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Boyolali	Jumlah Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	1 Paket	26.472.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi sesuai standar	100	15,850,539,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi sesuai standar	100	15,118,377,050	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	14,442,371,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	13,456,008,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 orang	12,206,948,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 orang	11,047,758,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	2,235,423,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali	Terbayarnya gaji THL/Tenaga Kontrak	12 dokumen	2,408,250,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan administrasi perkkantoran perangkat daerah	100	620,205,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan administrasi perkkantoran perangkat daerah	100	883,490,550	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,700,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	25,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	22,910,000	
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	250,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	294,865,500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	30,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	130,335,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	110,542,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	125,785,500	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	98,663,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	117,405,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	186,489,550	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		0	Pengadaan Mebel	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		10.000.000	
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Boyolali	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Boyolali	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi	100	482,533,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi	100	403,470,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali	umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1,140,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali	umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3,650,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	475,300,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	394,820,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	6,093,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	5,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100	305,430,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100	315,408,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 unit	185,430,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 unit	223,658,500	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Boyolali	Jumlah Mebel yang dipelihara	100	0	Pemeliharaan Mebel	Kab. Boyolali	Jumlah Mebel yang dipelihara	100	15,000,000	
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Boyolali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	20,000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Boyolali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	30,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Boyolali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Boyolali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	46,750,000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN BARANG POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase koefisiensi variasi harga antar waktu	12	20,000,000	PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN BARANG POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase koefisiensi variasi harga antar waktu	12	0	
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		koefisien harga antar waktu	12	20,000,000	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		koefisien harga antar waktu	12	0	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	umlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	2 laporan	20,000,000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah pasar murah yang dilaksanakan		0	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor	12,16	470,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor	12,16	380,000,000	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor	40 pelaku usaha	470,000,000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor	40 pelaku usaha	380,000,000	
	Pameran Dagang Nasional	Tingkat Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 pelaku usaha	470,000,000	Pameran Dagang Nasional	Tingkat Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 pelaku usaha	380,000,000	
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Boyolali	Prosentase alat UTTP yang sudah tertib ukur	57	20,000,000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Boyolali	Prosentase alat UTTP yang sudah tertib ukur	57	20,000,000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Boyolali	Prosentase alat UTTP yang ditera/tera ulang sah	57	20,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Boyolali	Prosentase alat UTTP yang ditera/tera ulang sah	57	20,000,000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Boyolali	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	15.000 UTTP	20,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Boyolali	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	15.000 UTTP	20,000,000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi (Permendagri 86 Tahun 2020)	0.72	45,213,000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi (Permendagri 86 Tahun 2020)	0.72	22,790,000	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Pelaku usaha yang memperoleh promosi	50 pelaku usaha	45,213,000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Pelaku usaha yang memperoleh promosi	50 pelaku usaha	22,790,000	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 pelaku usaha	45,213,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 pelaku usaha	22,790,000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase IKM yang terlatih	4.78	2,721,788,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase IKM yang terlatih	4.78	3,749,059,000	
No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang terlatih	510 IKM	2,721,788,000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang terlatih	510 IKM	3,749,059,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan	15 dokumen	2,721,788,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan	15 dokumen	3,749,059,000	

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Program dan Kegiatan yang sudah dituangkan dalam RKPD Tahun 2023 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI APBD 2023 DAN APBD-P 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2023			APBD-P Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD-P Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	30	Perdagangan									
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi sesuai standar		15.293.005.000		15.271.521.300			
3	30	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	13.586.398.000	100 %	13.542.239.000		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali	110 orang	11.178.146.000	Kab. Boyolali	110 orang	11.019.187.000
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali	12 dokumen	2.408.252.000	Kab. Boyolali	12 dokumen	2.523.052.000
3	30	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan administrasi perkkantoran perangkat daerah	100 %	927.728.500	100 %	1.127.183.800		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali	1 paket	5.700.000	Kab. Boyolali	1 paket	5.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2023			APBD-P Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD-P Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali	0	0	Kab. Boyolali	100	0			
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Boyolali	1 paket	22.910.000	Kab. Boyolali	1 paket	38.300.000			
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali	1 paket	294.864.500	Kab. Boyolali	1 paket	301.652.000			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Boyolali	1 paket	131.415.000	Kab. Boyolali	1 paket	263.025.000			
	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Boyolali	1 paket	121.704.500	Kab. Boyolali	1 paket	130.472.300			
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali	12 Laporan	119.645.000	Kab. Boyolali	12 Laporan	130.045.000			
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali	12 Laporan	231.489.500	Kab. Boyolali	12 Laporan	257.989.500			
3	30	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah			60.000.000			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Boyolali	1 paket	10.000.000	Kab. Boyolali	1 paket	66.750.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Boyolali	10 unit	50.000.000	Kab. Boyolali	10 unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2023			APBD-P Tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD-P Tahun 2023
1				2	3	4	5	6	7	8	9
3	30	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah			403.470.000			257.690.000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali	1 laporan	3.650.000	Kab. Boyolali	1 laporan	3.870.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Boyolali	12 laporan	394.820.000	Kab. Boyolali	12 laporan	248.820.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali	2 laporan	5.000.000	Kab. Boyolali	2 laporan	5.000.000
3	30	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah		100,00	315.408.500		100,00	277.658.500
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Boyolali	44 unit	223.658.500	Kab. Boyolali	44 unit	247.658.500
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Boyolali	10 unit	15.000.000	Kab. Boyolali	10 unit	0
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Boyolali	44 unit	30.000.000	Kab. Boyolali	44 unit	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2023			APBD-P Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD-P Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kab. Boyolali	1 unit	46.750.000	Kab. Boyolali	1 unit	0			
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik			26.372.000.000			33.487.000.000
3	30	0	2. 01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana distribusi perdagangan yang kondisinya baik			26.372.000.000			33.487.000.000
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	Kab. Boyolali	2 unit	26.372.000.000	Kab. Boyolali	2 unit	33.487.000.000
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor			351.160.000			371.160.000
3	30	05	2. 01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kab/Kota.		40 pelaku usaha	351.160.000		40 pelaku usaha	371.160.000
				Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Tingkat Nasional	5 pelaku usaha	351.160.000	Tingkat Nasional	5 pelaku usaha	371.160.000
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase alat UTTP yang sudah tertib ukur			20.000.000			20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Tahun 2023			APBD-P Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD-P Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase alat UTTP yang ditera/tera ulang sah		15.000 UTTP	20.000.000			20.000.000
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Boyolali	15.000 UTTP	20.000.000	Kab. Boyolali	15.000 UTTP	20.000.000
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi (Permendagri 86 Tahun 2020)			107.390.000			207.390.000
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaku usaha yang memperoleh promosi		50 Pelaku Usaha	107.390.000		50 Pelaku Usaha	207.390.000
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	50 UMKM	107.390.000	Kab. Boyolali	50 UMKM	207.390.000
3	31			Perindustrian							
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang terlatih			4.940.780.000			4.948.104.700
3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang terlatih		450 IKM	4.940.780.000		450 IKM	4.948.104.700

				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Boyolali	1 dokumen	2.040.780.000		1 dokumen	2.040.780.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Boyolali	15 dokumen	2.900.000.000	Kab. Boyolali	15 dokumen	2.907.324.700
				Total				47.084.335.00			54.305.176.000

BAB `IV
PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Boyolali, tentunya memiliki tantangan/masalah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023.

Pembangunan pasar pada akhirnya merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atau kebutuhan pelayanan dalam meningkatkan perekonomiannya. Oleh karena itu pembangunan pasar harus dipandang sebagai suatu investasi yang perlu perhatian khusus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan perekonomian merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia pada umumnya. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali disusun dengan memperhatikan perubahan situasi dan pendapatan daerah serta masukan dari berbagai pihak, lintas sektor, masyarakat dan kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali tahun berjalan sampai triwulan II.

Demikian penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2023, monitoring dan evaluasi perencanaan Renja Triwulan II Tahun 2023.

Boyolali, 2023

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOYOLALI



DARMADI, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19671120 198903 1 007